

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih langsung oleh masyarakat. Pemilihan langsung tersebut biasa dilaksanakan di negara yang menggunakan sistem demokrasi. Sargent menyatakan bahwa syarat dari demokrasi yaitu hadirnya keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan, adanya persamaan hak dalam kemerdekaan dan kebebasan bagi warga negara, adanya sistem perwakilan, sehingga hadir suatu sistem pemilihan (dalam Sahid 2015: 304). Budiardjo (2008: 106) menyatakan penerapan demokrasi di Indonesia didasarkan kepada Pancasila. Dalam praktik pelaksanaan demokrasi di Indonesia salah satunya yaitu dengan dilangsungkannya proses pemilihan umum atau Pemilu. Pemilu di Indonesia merupakan suatu hal yang penting karena akan menentukan arah kebijakan publik kedepannya. Dikutip dari *website* resmi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum (KEMENKUMHAM), Pemilu merupakan suatu wadah bagi warga Indonesia agar bisa ikut serta menentukan tokoh atau perwakilan rakyat yang dapat mempengaruhi arah kepemimpinan suatu wilayah atau negara Indonesia dalam periode tertentu yang diselenggarakan secara berkala. UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjelaskan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali harus berlangsung secara demokratis, di

mana masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih harus menggunakan hak pilihnya tersebut secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

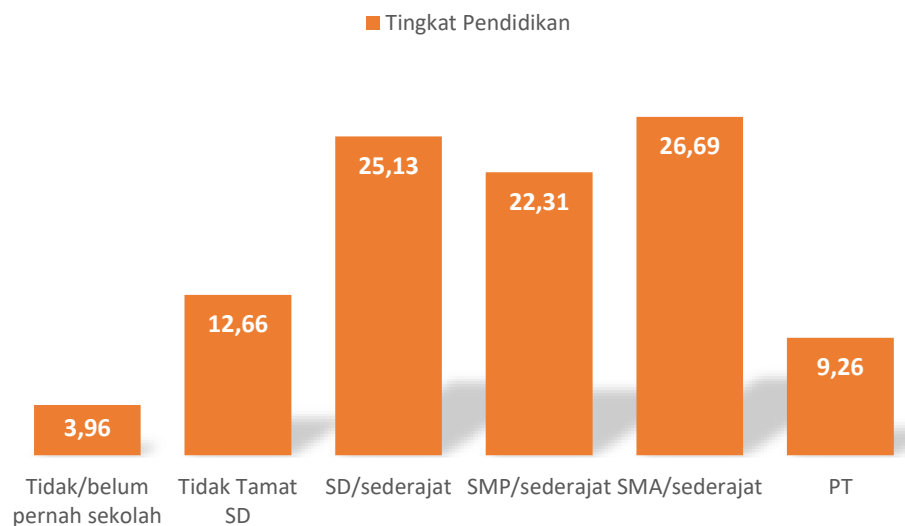
Pemilu yang diselenggarakan demi mencapai cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya harus berlangsung secara demokratis. Riduan *et al.* (2018: 5) menyatakan bahwa untuk tercapainya kemakmuran suatu masyarakat, maka perlu dilakukan pembangunan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara, ia juga menyatakan bahwa pembangunan politik akan menghasilkan warga negara yang lebih demokratis terutama pada saat masyarakat terlibat dalam Pemilu. Ketika membicarakan mengenai Pemilu yang demokratis, maka harus diketahui bagaimana proses demokrasi yang sebenarnya terjadi di Indonesia, dan hal tersebut bisa kita lihat dalam lingkungan masyarakat yang menjadi fokus utamanya.

Di lingkungan masyarakat, tidak sedikit kontestan politik yang kemudian menawarkan calon pemilihnya dengan berbagai kegiatan politik yang bersifat simbolik melalui komunikasi politik yang kental. Sahid (2015: 236) menyebutkan bahwa dalam komunikasi politik terdapat suatu pesan dan aktor politik. Pada saat proses komunikasi politik antara kontestan dengan calon pemilih biasanya dilakukan dengan mengunggulkan dirinya sendiri sebagai kontestan politik yang memiliki kesan baik seperti menjadi sosok religius, panutan, atau bahkan menjadi penyambung lidah rakyat. Namun, dibalik hal-hal yang dilakukan oleh kontestan politik tersebut masih banyak masyarakat Indonesia yang bahkan belum memahami apa itu politik yang sebenarnya. Maka dalam hal ini tentunya diperlukan suatu

pembangunan politik agar masyarakat mampu memahami secara logis realita politik yang ada.

Riduan *et al.* (2018: 5-6) menyatakan bahwa masyarakat di Indonesia masih belum memahami hal yang berkaitan dengan politik, dikarenakan menurutnya hal tersebut didukung dengan suatu kenyataan bahwa masyarakat Indonesia yang rata-rata masih berada di tingkat pendidikan skala menengah kebawah, sehingga dari hal tersebut akan melemahkan daya nalar atau pengetahuan masyarakat terhadap politik. Dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Riduan tersebut pernyataannya mengarah pada pendidikan formal bisa mempengaruhi pengetahuan politik masyarakat.

Gambar 1.1 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%), 2019



Sumber: BPS, Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2019: 82

Pernyataan yang dikemukakan oleh Riduan *et al.* bahwa tingkat pendidikan penduduk di Indonesia pada umumnya hanya mencapai pendidikan menengah kebawah, sesuai dengan data dari BPS yang juga menunjukkan demikian. Data dari BPS tersebut memperlihatkan bahwa hanya satu dari empat penduduk berusia 15

tahun ke atas yang telah menyelesaikan SMA/ sederajat, dan hanya sekitar sembilan persen yang berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang perguruan tinggi.

Fakta bahwa pendidikan penduduk Indonesia yang pada umumnya masih berada di skala menengah ke bawah, hal ini akan memudahkan kontestan politik dan politikus dalam menarik perhatian masyarakat. Strategi politik yang dilakukan dengan komunikasi politik yang kental berpotensi untuk melemahkan daya nalar politik masyarakat, terutama di kalangan masyarakat yang belum memahami politik, dan pendidikan politik.

Berkaitan dengan beberapa hal yang telah dijelaskan mengenai demokrasi dan hubungan antara pendidikan formal yang berpengaruh terhadap daya nalar masyarakat mengenai politik menjadikan karya tulis ini memfokuskan objeknya pada literasi politik. Pengetahuan politik dalam literasi politik pada masing-masing individu bisa mempengaruhi minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara efektif dalam memenuhi tugas kewarganegaraan mereka. Sehingga dengan pekanya masyarakat terhadap politik, diharapkan bisa menjadikan masyarakat yang lebih demokratis agar bisa tercapainya cita-cita bangsa Indonesia.

Karya tulis ini berisi tentang perbandingan literasi politik di desa dan kota tepatnya di Desa Ciheras Kabupaten Tasikmalaya dan Kelurahan Sukaasih Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (2019) Desa Ciheras merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dengan luas wilayah sebesar 2.637,88 Km² dan berjarak 85 Km ke pusat Kabupaten Tasikmalaya, dan berada di 15 mdpl yang menjadikan wilayah ini

termasuk wilayah yang dekat dengan pesisir pantai. Jumlah penduduk Desa Ciheras pertahun 2019 berada di angka 6.305 orang. Sedangkan Kelurahan Sukaasih merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya dengan luas wilayah sebesar 3.10 Km², berjarak 5,2 Km ke pusat Kota Tasikmalaya, dan dengan jumlah penduduk pertahun 2019 sebanyak 6.488 orang.

Pemilihan tempat yang dilakukan di tingkat Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya ini didasarkan atas adanya pernyataan Al-Hakim (2015:126) yang menyebutkan bahwa kota berfungsi sebagai pusat pendidikan. Maka dari itu, karya tulis ini menjadikan kota sebagai wilayah pembanding. Hal tersebut didasarkan pada data BPS yang menyebutkan bahwa terdapat kesenjangan pendidikan antara desa dan kota, di mana pendidikan di wilayah kota lebih baik daripada wilayah desa yang biasanya masih kurang akses terhadap beberapa kebutuhan untuk memenuhi proses pendidikannya.

BPS (2019: 89) menyatakan bahwa tingkat penyelesaian sekolah menjadi salah satu alat ukur dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan rencana aksi global dengan salah satu tujuannya yaitu mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Untuk melihat kesenjangan yang terjadi di desa dan kota, maka tabel 1.1 memperlihatkan data tingkat penyelesaian sekolah tahun 2019 berdasarkan wilayah desa dan kota.

Tabel 1.1 Data Tingkat Penyelesaian Sekolah Tahun 2019

| Karakteristik Tipe Daerah | Usia 13-15 Tahun Lulus SD/Sederajat | Usia 16-18 Tahun Lulus SMP/Sederajat | Usia 19-21 Tahun Lulus SMA/Sederajat |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Perkotaan | 97,01% | 88,61% | 65,89% |
| Perdesaan | 93,68% | 80,80% | 47,25% |

Sumber : BPS, Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2019: 90

Berdasarkan data pada tabel 1.1 bisa dilihat bahwa wilayah desa memiliki presentase tingkat penyelesaian sekolah yang lebih rendah dibandingkan dengan kota. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa seiring meningkatnya jenjang pendidikan, maka kesenjangan pendidikan antara masyarakat desa dan kota semakin melebar. Selain itu, BPS (2019: 82-83) menyebutkan bahwa kesenjangan pendidikan di wilayah desa dan kota bisa dilihat dari angka penduduk yang tidak pernah bersekolah, di mana desa memiliki penduduk yang tidak pernah bersekolah sebesar 6,16%, dan hanya sebesar 2,26% penduduk yang tidak pernah bersekolah di wilayah kota. Data lain yang menunjukkan bahwa pendidikan di kota lebih baik daripada desa, yaitu data BPS yang mencantumkan bahwa penduduk di desa hanya tamatan SD dengan presentase 31,77%, di mana hal tersebut timpang dengan sebagian besar penduduk di wilayah perkotaan yang telah mampu menyelesaikan pendidikannya hingga tamat SMA dengan persentase 33,13%.

Kesenjangan pendidikan di desa dan kota pun bisa dilihat dari indeks pendidikan. Indeks pendidikan ini merupakan gambaran dari hasil pembangunan pendidikan itu sendiri, yang dipengaruhi oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan data dari BPS Jawa Barat, pada tahun 2019 indeks pendidikan di Provinsi Jawa Barat sebesar 62,57%. Sedangkan indeks pendidikan khususnya di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya memiliki perbedaan, yang mana perbedaan ini sesuai dengan data sebelumnya dari BPS bahwa pendidikan formal di kota lebih baik daripada di desa, dengan indeks pendidikan per tahun 2019 di Kota Tasikmalaya sebesar 67,77% dan di Kabupaten Tasikmalaya hanya mencapai angka 58,68%.

Pernyataan Riduan *et al.* yang menyebutkan bahwa pendidikan formal bisa mempengaruhi pengetahuan dan daya nalar masyarakat terhadap politik tidak secara langsung menjadi bagian dari dimensi literasi politik. Namun dikarenakan fokus atau objek dari karya tulis ini yaitu mengenai literasi politik, maka hubungan antara pendidikan formal dengan pengetahuan politik menjadi hal yang penting. Karena dalam literasi politik, pengetahuan politik tersebut akan mempengaruhi minat dan peran serta masyarakat terhadap politik, yang mana peran serta masyarakat tersebut bisa dilihat dari angka partisipasi masyarakat.

Tabel 1.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu tahun 2019 di Desa Ciheras Kabupaten Tasikmalaya dan Kelurahan Sukaasih Kota Tasikmalaya

| Desa/Kelurahan | Jumlah Pemilih/ DPT | Jumlah Pengguna Hak Pilih | Partisipasi Masyarakat |
|----------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Ciheras | 4.737 | 3.816 | 80,56% |
| Sukaasih | 4.394 | 4.030 | 91,72% |

Sumber : Data KPU Kabupaten dan Kota Tasikmalaya (data diolah)

Tabel 1.2 merupakan data partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2019 antara Desa Ciheras Kabupaten Tasikmalaya dengan Kelurahan Sukaasih Kota Tasikmalaya, di mana keduanya sama-sama memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang baik. Namun, pernyataan sebelumnya mengenai pendidikan formal dapat mempengaruhi pengetahuan dan daya nalar masyarakat terhadap politik, serta data yang menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan pendidikan antara wilayah desa dan kota, maka karya tulis ini dibuat untuk membuktikan apakah partisipasi masyarakat yang dilakukan pada saat Pemilu 2019 di Desa Ciheras dan Kelurahan Sukaasih benar-benar dilandaskan oleh pengetahuan dan pemahaman politik yang baik atau tidak. Apakah karena pendidikan di desa lebih rendah daripada di kota menyatakan tingkat rasionalitas terhadap literasi politiknya juga

kurang baik, dan apakah pendidikan di kota yang lebih baik daripada di desa menyatakan bahwa tingkat rasionalitas terhadap literasi politiknya juga lebih baik. Sehingga, jika masyarakat telah memiliki pengetahuan politik yang baik maka akan mencapai tingkat partisipasi politik dan minat politik yang baik pula, dan jika hal tersebut telah terpenuhi maka bisa mencapai masyarakat yang lebih demokratis.

Penelitian yang memiliki fokus serupa dengan yang akan diteliti yaitu penelitian dengan judul ‘Fenomena Melek Politik (*Political Literacy*) Masyarakat Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara’ oleh Riduan *et al.* (2018). Penelitian yang dilakukan di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan analisa data menggunakan teknik Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa masih kurangnya pengetahuan politik masyarakat, di mana masyarakat masih mengartikan politik diluar arti yang sebenarnya. Dari penelitian Riduan *et al.*, penulis mencoba untuk mengambil beberapa poin penting yang diterapkan dalam karya tulis ini. Poin yang bisa diambil dalam penelitian Riduan *et al.* yaitu indikator atau dimensi literasi politik yang terbagi kedalam tiga hal pokok yakni pengetahuan politik, partisipasi politik, dan minat politik.

Selain penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat penelitian lain yang membahas mengenai literasi politik, dan menjadi referensi serta gambaran bagi penulis dalam melakukan proses penelitian. Bahan referensi tersebut antara lain:

Karim *et al.* (2014), melakukan penelitian dengan judul ‘Memahami Tingkat Melek Politik Warga di Kabupaten Sleman’. Penelitian ini memaparkan

mengenai definisi literasi politik, serta kualitas dari literasi politik yang difokuskan pada masyarakat di daerah Kabupaten Sleman, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa di Kabupaten Sleman memiliki literasi politik yang berbeda-beda, meskipun memang sebagian warganya sudah memiliki tingkat literasi politik yang baik, namun masih ada masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya karena dilandaskan terhadap motivasi uang yang diperoleh dari kandidat, selain itu masih ada masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya karena pengaruh dari keluarga dan relasi atau tokoh lainnya.

Lestari (2016), melakukan penelitian dengan judul ‘Analisa Melek Politik Warga pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Studi Kasus: Desa Jerukwudel dan Desa Karangawen Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul DIY’. Penelitian ini dilakukan di dua wilayah yaitu di Desa Jerukwudel dan Desa Karangawen dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini literasi politik memiliki makna yang sama dengan suatu istilah yang disebut dengan melek politik. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Jerukwudel dan Karangawen, literasi politik sudah cukup baik, setidaknya dalam hal pengetahuan tentang kriteria pencalonan, pemilu yang bersih, dan tidak adanya serangan fajar saat Pemilu berlangsung. Di mana dengan adanya hal tersebut bisa dijadikan sebagai modal yang penting untuk meningkatkan partisipasi politik.

Putri (2017), Melakukan Penelitian dengan judul ‘Dampak Literasi Politik terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pemilu’. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dan metode eksplanatori

sekuensial yang ada pada metode penelitian deskriptif korelasional, yang dimulai dengan pengumpulan data dan dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa literasi politik merupakan kombinasi dari sikap politik, termasuk pemilu, pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi politik dalam penelitian ini berkaitan dengan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan politik, strategi pencarian, gerakan pengkomunikasian informasi, dan hadirnya suatu evaluasi sebagai bentuk akhir dari adanya proses politik. Penelitian inipun memuat mengenai muatan pokok dari literasi politik, seperti partisipasi politik, dan pemahaman kritis warga atas hal-hal pokok terkait politik. Penelitian ini lebih terfokus pada literasi politik dalam hal partisipasi pemilih saat dilakukannya Pemilu. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat melek politik warga Kabupaten Solok dalam Pemilu/Pemilu Kada dapat dinyatakan cukup baik dengan tingkat capaian responden 2,85 dari skala 4 dan tingkat melek politik berada pada angka 71,6%.

Gatara & Nurjaman (2017), melakukan Penelitian dengan Judul ‘Literasi Politik Masyarakat Pesisir dan Manajemen Partai Politik’. Penelitian ini menggunakan metode *transect*, rembug warga, perencanaan partisipatif, sinergi, program dan pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil pengabdian dan penelitian tentang manajemen partai politik tingkat bawah bagi literasi politik masyarakat pesisir Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut menunjukkan masih kurangnya pemahaman mengenai politik dan fungsi dari partai politik. Dalam kasus ini masih hadirnya pandangan yang bersifat negatif terhadap pengetahuan dan sikap politik. Misalnya masih adanya pandangan bahwa politik

merupakan suatu bentuk perebutan kekuasaan belaka, dan pandangan terhadap partai politik yang dianggap sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Penelitian Gatara & Nurjaman (2017) ini sekaligus menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai literasi politik di Desa Ciheras yang notabene nya merupakan masyarakat pesisir seperti masyarakat di Kecamatan Cikelet, dalam hal ini penulis sekaligus ingin mengetahui apakah literasi politik khususnya pemahaman politik di Desa Ciheras sama dengan Kecamatan Cikelet atau tidak.

Dari masing-masing judul penelitian yang telah disebutkan memiliki fokus yang sama yaitu mengenai literasi politik, di mana di dalam penelitian-penelitian tersebut termuat definisi-definisi mendasar mengenai literasi politik itu sendiri. Lingkup atau lokasi dalam penelitian terdahulu kebanyakan hanya di satu lokasi saja, di mana hal ini berbeda dengan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, karena akan melakukan perbandingan mengenai literasi politik masyarakat di dua wilayah. Dari uraian sebelumnya maka penelitian ini membahas mengenai “Perbandingan Literasi Politik antara Desa Ciheras Kabupaten Tasikmalaya dengan Kelurahan Sukaasih Kota Tasikmalaya (Analisis pada Masyarakat yang telah Memiliki Hak Pilih dalam Pemilu Tahun 2019)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka diidentifikasi rumusan masalah dalam karya tulis ini yaitu bagaimana perbandingan literasi politik antara masyarakat Desa Ciheras Kabupaten Tasikmalaya dengan Kelurahan Sukaasih Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan literasi politik antara masyarakat Desa Ciheras Kabupaten Tasikmalaya dengan Kelurahan Sukaasih Kota Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai perbandingan literasi politik antara desa dengan kota, khususnya pada masyarakat yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilu.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pentingnya literasi politik, demi terciptanya masyarakat yang lebih demokratis.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai kajian bagi peneliti berikutnya yang akan membahas mengenai literasi politik masyarakat baik di desa maupun kota.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain dilihat dari segi teoritis, penelitian ini juga dapat berguna bagi:

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai landasan pemikiran setiap warga negara akan pentingnya literasi politik, sehingga bisa memunculkan sikap yang lebih demokratis.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi institusi terkait dalam upaya melakukan sosialisasi tentang pentingnya membentuk dan meningkatkan literasi politik di negara demokrasi.

- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis, serta memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian lapangan yang berkaitan dengan literasi politik antara masyarakat yang berada di wilayah desa dan kota.

